

**EFEKTIVITAS SOSIALISASI PEMILU DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KPU KOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT**

Gunawan Dedi Wahyudi

NPP 29.1885

Asdaf Kota Sorong, Provinsi Papua Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : gunawandediw28@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The level of achievement of the people of Sorong City towards the level of political participation is still low, according to the achievement of the people of Sorong City in 2017 only reaching 64.6% and based on the national target of 77%, it is said that the achievements of the people of the City of Sorong Push is still very low. In the 2019 election, the level of achievement of the people of Sorong City reached 82%, thus the level of achievement of the people of Sorong City has increased. Objective: The purpose of this study was to determine the effectiveness of election socialization in order to increase public political participation in the KPU Sorong City, West Papua Province so that it can be a guide for each KPUD in increasing public political participation. Methods: This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques were carried out by interview techniques (5 informants) and documentation on the implementation of socialization activities carried out by the Sorong City KPU. Results/Findings: The findings obtained by the authors in this study are that the level of participation of the people of Sorong City is still low due to the busyness of each Sorong City community in their work, so that the level of participation during the implementation of election socialization is still very low and this makes the level of participation in the general election socialization very low. the achievement of Sorong City's community participation in the general election is still low. Conclusion: In general, the entire plan for implementing the socialization provided by the Sorong City KPU has gone well, but the obstacles faced lie in the community itself so that more innovative socialization programs are needed such as choosing a strategic place in the implementation of election socialization and utilizing social media so that facilitate the public in obtaining information related to the implementation of the stages of the election.*

Keywords: *Effectiveness, Socialization, Community Political Participation, General Election Commission.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Tingkat capaian masyarakat Kota Sorong terhadap tingkat partisipasi politik yang masih rendah, sesuai dengan perolehan capaian masyarakat Kota Sorong pada tahun 2017 hanya mencapai 64,6% dan hal berdasarkan target nasional 77% maka dikatakan capaian masyarakat Kota Sorong masih sangat rendah. Pada pemilu 2019 tingkat capaian masyarakat Kota Sorong mencapai 82% , dengan demikian tingkat capaian masyarakat Kota Sorong mengalami peningkatan. **Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat di KPU Kota Sorong Provinsi Papua Barat sehingga dapat menjadi pedoman bagi setiap KPUD dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. **Metode :** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara (5 informan) dan dokumentasi pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Sorong. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu tingkat partisipasi masyarakat Kota Sorong yang masih rendah disebabkan oleh adanya kesibukan masing-masing masyarakat Kota Sorong dalam pekerjaan, sehingga tingkat partisipasi pada saat pelaksanaan sosialisasi pemilu masih sangat kurang dan hal ini yang membuat tingkat capaian partisipasi masyarakat Kota Sorong pada pemilihan umum yang masih rendah. **Kesimpulan :** Pada umumnya seluruh rencana pelaksanaan sosialisasi yang diberikan oleh KPU Kota Sorong telah berjalan dengan baik, namun kendala yang dihadapi terletak pada masyarakat itu sendiri sehingga diperlukan program-program sosialisasi yang lebih inovatif seperti memilih tempat strategi dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu dan memanfaatkan media sosial sehingga mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pelaksanaan tahapan pemilu.

Kata Kunci : Efektivitas , Sosialisasi , Partisipasi Politik Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum telah diatur dalam penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum yang sifatnya nasionalis, tetap dan mandiri. Bentuk yang menjadi tugas pokok dan wewenang KPU adalah proses penyelenggaraa Pemilu antara lain yaitu menyelenggarakan pemilihan umum Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Salah satu proses dilaksanakannya tugas penting dalam pelaksanaan pemilu tersebut yaitu dengan adanya pemberian atau penyampaian informasi terkait proses sosialisasi yang diberikan kepada seluruh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan KPU No. 11 Tahun 2010 mengenai adanya Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menerangkan bahwa lembaga KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang sifatnya nasionalis, tetap dan mandiri. Membahas mengenai proses dari pada pemberian informasi terkait sistem, prosedur dalam teknis, tahapan pemilihan umum, hasil akhir pemilu, program dari jadwal pelaksanaan, serta hal lainnya tentang pelaksanaan pemilihan umum oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan salah satu bentuk dari tugas dan peran oleh KPU. Sosialisasi merupakan salah satu cara KPU dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya hak suara dan partisipasi pemilih, dengan demikian KPU memiliki peran penting dalam menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat guna mencapai tingkat partisipasi yang maksimal sebagai perwujudan negara yang demokrasi.

Melihat pelaksanaan sosialisasi pemilihan umum yang dilakukan di Kota Sorong KPU pada 2017 KPU telah menunjukkan beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih salah satunya dengan publikasi melalui RRI dan CWM, aksi turun lapangan yang bertujuan memberikan informasi kepada setiap masyarakat Kota Sorong yang mempunyai suara hak pilih untuk melakukan pemeriksaan namanya yang sudah disosialisasikan kepada seluruh struktur BPD, BPPS hingga ke TPS. Sehingga, menghasilkan data dengan jumlah pemilih tetap pada pilkada 2017 sebesar 146.413 dengan pengguna hak pilih 94.605 dengan tingkat presentase pemilih sebesar 64,6% dan tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 35,4% . maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kota Sorong pada Pilkada 2017 masih dikatakan rendah dan perlu adanya peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu selanjutnya.

Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat fenomena menyangkut jumlah total surat suara yang masih banyak ditemukan yaitu sebanyak 2.602 surat suara berisi kolom kosong. Meskipun demikian, data presentase tingkat partisipasi pemilih dikatakan meningkat jika dibandingkan dengan pemilihan yang sebelumnya. Terkait fenomena ini merupakan tugas dan peran KPU yang salah satunya melakukan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat mengenai tahapan teknis cara dalam menggunakan hak suara politik pada setiap pemilihan umum. Selain itu, masih terdapat surat suara yang tidak sah bila ditelusuri berdasarkan tempat distrik dimana yang dikenal tiap distrik merupakan asal dari pasangan calon. Berdasarkan data yang telah diperoleh maka tingkat pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya di Tahun 2017 yaitu sebesar 35.4%. Dari fakta tersebut tentang sosialisasi pemilu di Kota Sorong yang dilaksanakan oleh KPU terindikasi adanya efektivitas kenaikan dan masih perlu ditingkatkan dalam pemilihan selanjutnya.

Budiarjdo (2008) mengemukakan bahwa proses sosialisasi berlangsung seumur hidup, terutama terjadi pada usia anak-anak. Yang selanjutnya bertahap dari lingkup keluarga, pendidikan, dunia kerja, organisasi-organisasi maupun di partai politik. Yang menjadi perantara antara mensosialisasikan nilai politik yang berangsur dari generasi satu ke generasi yang selanjutnya dan dalam inilah waktu momentum setiap partai politik berperan dalam sarana dan prasarana sosialisasi politik. Pelaksanaan dari fungsi sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara yaitu pada media massa, penyuluhan, pengkaderan, penataran dan lainnya.

Karena faktor tersebut KPU Kota Sorong telah gencar melakukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 bisa lebih meningkat. Sosialisasi yang dilakukan KPU dari tahun 2018-2019 yaitu pertama dengan melakukan sosialisasi ke berbagai kalangan dengan masuk ke berbagai sekolah, maupun mendatangi setiap perumahan masyarakat yang memberikan informasi tahapan pelaksanaan pemilihan umum dan bersifat mengajak dalam berpartisipasi tiap tahapan pemilihan umum.

Kedua, sosialisasi pemilu dilakukan menggunakan metode dan media, seperti dengan penggunaan metode komunikasi tatap muka yang meliputi seminar maupun diskusi, melalui media massa seperti penyiaran radio, televisi maupun di dalam media sosial dan mobilisasi sosial. Sementara dalam media yang paling penting digunakan adalah surat kabar, koran dan media elektronik seperti Televisi dan saluran radio RRI. Adanya papan pengumuman, poster, spanduk, banner, baliho yang biasanya dipasang di pinggir jalan umum sebagai bentuk media pendukung. Pemasangan dan upaya penyiaran melalui media tersebut telah dilakukan melalui kerja sama antara instansi terkait, pemerintah daerah, melalui radio, mediacetak maupun stasiun TV.

Sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu tersebut adalah masyarakat Kota Sorong, remaja pelajar dan mahasiswa pada pemilih pemula, wanita, pengemuka pendapat ahli, para petani, pekerja buruh dan beberapa pekerjaan lainnya, jurnalistik serta kelompok media seperti partai politik, pada pengawas atau pemantau jalannya pemilihan umum, Lembaga Survei Masyarakat dan pemilih disabilitas yaitu pada masyarakat yang memiliki

kebutuhan khusus seperti penyandang cacat, masyarakat pedalaman, para narapidana, pedagang pinggir jalan serta kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Sosialisasi pemilu dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran pentingnya hak guna suara setiap pemilih dalam mempengaruhi hasil keputusan serta guna menentukan para calon pemimpin di suatu daerah. Sesuai dengan data Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2019 jumlah daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019 yaitu Laki-laki: 74,224 Perempuan: 70,745 dengan jumlah total: 144,989 dengan presentase pengguna hak pilih : 82% serta masyarakat yang tidak mempergunakan hak suara pilihnya sebanyak 12% . Berikut adalah jumlah persentase dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong 2019

Berdasarkan hasil tingkat perbandingan penelitian persentase dapat di nyatakan bahwa adanya peningkatan terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu pada tahun 2019 yang berarti adanya efektivitas dari kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tentu hal tersebut menjadi harapan yang bersifat permanen bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu pada 2017 dimana capaian masyarakat Kota Sorong yang masih sangat kurang. Penyebab dari kurangnya capaian masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat Kota Sorong dalam menggunakan hak suara sehingga dengan penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan capaian tingkat partisipasi masyarakat khususnya di Kota Sorong.

1.2 Kesenjangan Masalah yang diambil

Terdapat permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat di KPU Kota Sorong, salah satunya yaitu masyarakat Kota Sorong sendiri, dimana tingkat capaian masyarakat pada pilkada 2017 sebesar 146.413 jiwa dengan pengguna hak pilih 94.605 dengan tingkat presentase pemilih sebesar 64,4% dan tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 35,4% dengan perbandingan target nasional yang mencapai 77% maka angka tersebut masih sangat rendah dengan yang diharapkan . Selanjutnya pada pemilu 2019 tingkat capaian masyarakat Kota Sorong mencapai 82% dengan target nasional sebesar 77,7% tentu dengan perbandingan tersebut tingkat partisipasi masyarakat mengalami kenaikan . Hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong terletak pada masyarakatnya dimana masyarakat Kota Sorong banyak yang memiliki kesibukan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan sehingga mempengaruhi tingkat kehadiran pada pelaksanaan sosialisasi pemilu maupun tahapan pemilu.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, adapun berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan masukan bagi penulis:

Yang pertama Satrio Darmawan pada tahun 2018 telah melakukan penelitian mengenai strategi KPU Kota Serang untuk meningkatkan Partisipasi pemilih dalam Pilkada Provinsi Banten tahun 2017. Adapun lokasi penelitian adalah Kota Serang. penggunaan metode penelitian dengan kualitatif deskriptif serta analisis SWOT, hasil penelitian menyebutkan

bahwa KPU Kota Serang memanfaatkan pada media elektronik dan media internet guna memvalidasi data pemilih dan melayani masyarakat agar lebih maksimal serta sosialisasi di berbagai kalangan lingkungan masyarakat.

Yang kedua Yesi 2019 pada tahun telah melakukan penelitian tentang upaya komisi pemilihan umum provinsi Sumatra Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019. Adapun lokasi penelitian yaitu kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Menggunakan metode tipe deskriptif dan pendekatan kualitatif, hasil menunjukkan bahwa dalam usaha peningkatan partisipasi politik masyarakat. Hasil yang telah dicapai dari peningkatan sebesar 63% pada tahun 2013, 69,2% di tahun 2018 serta peningkatan 81,42% di tahun 2019.

Yang ketiga Dwi Haryono pada tahun 2018 tentang penelitian strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota dan wakil walikota samarinda tahun 2015. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pada hasil penelitian ini menunjukkan strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih yaitu dengan tiga strategi yang dilakukan KPU yaitu strategi kelembagaan, sosialisasi dan pendidikan politik pemilih pemula.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana teori yang digunakan oleh peneliti Satrio Darmawan, Yesi dan Dwi Haryono berbeda dengan teori yang dipakai pada oleh penulis. Selain itu peneliti sebelumnya berfokus kepada peran dari pada lembaga Komisi Pemilihan Umum sedangkan penelitian yang sekarang lebih berfokus kepada program sosialisasi yang dilaksanakan serta pengukuran / indikator yang digunakan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan teori efektivitas menurut (Richard M. Steers, 1985:85) dimana terdiri dari Dimensi Pencapaian tujuan yang memiliki dua indikator yaitu kurun waktu dan sasaran , Dimensi Integritas dan Dimensi Adaptasi .

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat di KPU Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

II. METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana menurut Sugiono (2010:9) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimana instrument kunci adalah peneliti sendiri, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara penggabungan dan analisis data yang bersifat induktif.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, Divisi perencanaan, data dan informasi , Divisi Teknis Penyelenggara, Divisi sosialisasi, pendidikan politik, parmas dan Masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan

teori efektivitas (Richard M. Steers,1985:53) , terdapat 3 dimensi yaitu dimensi pertama , pencapaian tujuan yang terdiri dari 2 indikator yaitu kurun waktu dan sasaran. Dimensi kedua, Integritas dan Dimensi ketiga Adaptasi .

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.1 Bagaimana Efektivitas Sosialisasi Pemilu Dalam Rangkat Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di KPU Kota Sorong Provinsi Papua Barat

4.1.1.1 Pencapaian Tujuan

4.1.1.1.1 Kurun Waktu

Berdasarkan perbandingan mengenai program kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong melakukan sosialisasi dengan rentang waktu yang panjang sehingga banyak masyarakat mengabaikan atau lupa terhadap kegiatan pemilu dikarenakan pelaksanaan yang masih lama sedangkan pada tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong melakukan kegiatan sosialisasi dengan rentang waktu secara terus menerus hingga menjelang proses tahapan pemilihan sehingga hal tersebut yang menjadikan masyarakat Kota Sorong lebih mengalami peningkatan pada jumlah partisipasi pemilih.

4.1.1.1.2 Sasaran

Berdasarkan hasil tingkat partisipasi pada tahun 2017 terlihat bahwa program kegiatan sosialisasi pada tahun 2017 hanya mencapai 60,89% sedangkan pada tahun 2019 target nasional Komisi Pemilihan Umum yaitu 77,7% dan target Kabupaten Kota yaitu 78%, sedangkan pencapaian partisipasi masyarakat Kota Sorong yang diperoleh sebesar 82% sehingga dengan capaian tersebut efektifitas sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong sangat efektif.

4.1.1.2 Integritas

Berdasarkan hasil dari seluruh wawancara di atas dapat nyatakan bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada umumnya sudah berjalan dengan sangat baik dan dengan adanya kerja sama bersama babinsa, kamtibmas yang melekat serta mahasiswa yang membuat komisi pemilihan umum Kota Sorong lebih efisien dalam melaksanakan program sosialisasi baik di lingkungan masyarakat, sekolah pada pemilih pemula, maupun kelompok-kelompok tertentu.

4.1.1.3 Adaptasi

Berdasarkan hasil dari seluruh wawancara di atas dapat nyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi penyesuaian yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum Kota Sorong dalam pelaksanaan selalu terlebih dahulu berkoordinasi kepada pihak yang bersangkutan baik yang menjadi sasaran tujuan maupun berkoordinasi terkait tempat pelaksanaan program sosialisasi sehingga target tingkat partisipasi masyarakat sesuai dengan yang telah direncanakan. Kedua, Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong melalui

kerjasama dengan mahasiswa melakukan sosialisasi dengan cara mendatangi setiap rumah warga yang sulit untuk di jangkau, sehingga masyarakat tersebut mendapatkan sosialisasi mengenai tahapan pemilihan umum.

Dalam pelaksanaan penyesuaian kegiatan sosialisasi, komisi pemilihan umum Kota Sorong juga menyiapkan beberapa sarana dan prasana seperti tenda, kursi dan snack bagi para peserta sosialisasi. dan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan cara seperti ini tingkat partisipasi masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi telah sesuai dengan jumlah kursi yang telah disiapkan sebelumnya

4.2.2 Apa Hambatan Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Menghadapi Hambatan Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di KPU Kota Sorong Provinsi Papua Barat

4.2.2.1 Pencapaian Tujuan

4.2.2.1.1 Kurun Waktu

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan atau kendala yang hadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong mengenai kurun waktu pelaksanaan tidak ditemukan mengenai hambatan yang terjadi.

4.2.2.1.2 Sasaran

Berdasarkan hasil dari seluruh wawancara mengenai kendala waktu dan sasaran dalam kegiatan sosialisasi, pada saat dilapangan yang menjadi permasalahan yaitu hanya sasaran tujuan, dimana kehadiran masyarakat yang masih kurang menjadi permasalahan dalam kegiatan sosialisasi, dilatar belakangi oleh adanya kesibukan pekerjaan masyarakat yang menuntut mereka untuk tetap bekerja.

4.2.2.2 Integritas

Berdasarkan dari seluruh hasil wawancara mengenai penyesuaian pelaksanaan program sosialisasi yaitu penyesuaian mengenai sasaran yang menjadi tujuan, penyampaian sosialisasi kepada pemilih disabilitas serta jarak perumahan warga yang sulit dijangkau atau jauh dari pemukiman yang dilakukan dengan cara mendatangi rumah-rumah tersebut.

4.2.2.3 Adaptasi

Berdasarkan dari seluruh hasil wawancara mengenai penyesuaian pelaksanaan program sosialisasi yaitu penyesuaian mengenai sasaran yang menjadi tujuan, penyampaian sosialisasi kepada pemilih disabilitas serta jarak perumahan warga yang sulit dijangkau atau jauh dari pemukiman yang dilakukan dengan cara mendatangi rumah-rumah tersebut.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Sorong masih sangat rendah hal tersebut sesuai dengan hasil capaian pemilu pada tahun 2017 hanya mencapai 64,4% sedangkan target nasional yang diharapkan sebesar 77% . Selanjutnya pada saat pelaksanaan pemilu 2019 tingkat capaian masyarakat menjadi 82% tentu dengan

hal tersebut terjadi kenaikan tingkat partisipasi masyarakat Kota Sorong. Dengan adanya penelitian ini diharapkan KPU Kota Sorong menjadi pedoman dan tolak ukur bagi setiap KPUD lainnya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakatnya. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat KPU Kota Sorong telah melakukan beberapa program seperti : sosialisasi secara langsung kepada masyarakat , melakukan perekrutan bagi para relawan demokrasi dalam memaksimalkan program sosialisasi dan memanfaatkan media sosial dalam memberikan informasi terkait mekanisme tahapan pemilu.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu yang singkat.

Arah Masa Depan Penelitian : Penulis menyadari bahwa masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan efektivitas sosialisasi pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat di KPU Kota Sorong Provinsi Papua Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- A.R, Syamsudin dan Vismaia S. Damaianti. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI dan PT Remaja Rosdakarya.
- Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu dan perilaku memilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Eureka dan Pusat studi demokrasi dan Ham (PUSDEHAM)
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Firmansyah. 2010. *Persaingan Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Handoko, T. Hani. 2000. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE
- Joan Nelson & Samuel P. Huntington. 1973. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Cetakan Andi Offset. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Makmur, 2011 Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan. Bandung: Refika Aditama

Mead, George Herbert. 1972. *Mind, Self, and Society, edited and with an introduction by Charles W. Morris*. Chicago: University of Chicago Press.

Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Subakti, A. G. 2013. *Pengaruh Motivasi, Kepuasan, dan Sikap Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Cafe X Bogor*. Binus Bussines Review Vol.4 No.2.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 *Tentang Penjelasan Umum*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Tentang Pemilihan Umum*.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 *Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum*.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 *tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum*.

Peraturan KPU No. 11 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum*.

Sumber lainnya

Chandler, D.E., Hall, D.T. 2005. *Psychological Success: When the Career is a Calling*. Journal of Organization Behavior, 26, 155-176.

Andi Chandra, Erik Darmawan dan Yesi. 2018. *Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Selatan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019*. Skripsi

Charles, H. Cooley. 2005. *Sociological Theory And Social Resources*. New York: Henry Holt and Company.

Dwi Haryono. 2018. *Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015*. Skripsi

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EIXtnfYuOwgJ:kota-sorong.kpu.go.id/+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>